



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019



DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

Jl. Ir. H. Djuanda (Kompleks Perkantoran-Kota Tasikmalaya)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2019. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2010 dan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Tasikmalaya, Februari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TASIKMALAYA

UUS SUPANGAT, dr.

Pembina – IV/a

NIP. **19700903 200604 1 008**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Gambaran Umum Dinas kesehatan	2
Tugas dan Fungsi.....	3
Isu strategis.....	4
Landasan Hukum.....	5
Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategik Tahun.....	14
Visi.....	19
Misi	31
Tujuan dan sasaran.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
B. Realisasi Anggaran.....	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kegagalan Pencapaian Sasaran.....	76
B. Solusi	79



Dinas Kesehatan



DAFTAR TABEL



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari *Good Government dan Clean Govenance*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai salah satu bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan Dinas Kesehatan pada tahun 2019, keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan,



menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional.

Agar upaya kesehatan yang dilakukan dapat mencapai hasil guna dan memberi daya guna yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Renstra merupakan suatu proses pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul serta mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis.

Restra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana program/kegiatan masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya serta dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi agar pembangunan kesehatan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada



pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Tasikmalaya khususnya di bidang kesehatan.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban



yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berfungsi sebagai pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan kesehatan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tasikmalaya. Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.



Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

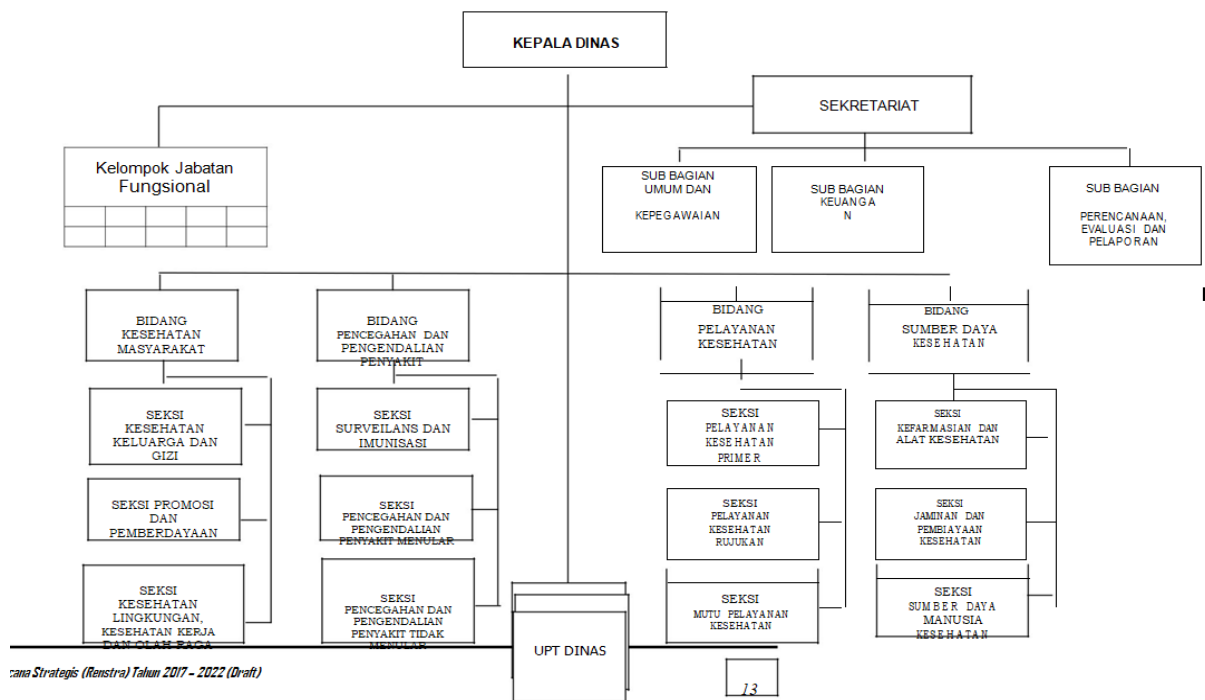
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan pelaporan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Membawahkan:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular



- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan;
 - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



ana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 (Draft)

Isu Strategis

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktifitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan secara lebih merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita,



meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pemerintah masih menghadapi tantangan lima isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan (2020-2024). Kelima isu utama tersebut telah diidentifikasi dalam Rakerkesnas (Rapat Kerja Nasional) tahun 2019 yakni angka kematian ibu atau angka kematian neonatal yang masih tinggi, *stunting*, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Data hasil Litbangkes berskala nasional sangat diperlukan untuk mengevaluasi program nasional, salah satunya Riskesdas dan Burden of Disease atau BoD (mengukur besarnya perbandingan *health loss* dari semua macam penyakit mayor).

Riskesdas juga mengungkapkan terjadi peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang memerlukan strategi penanganan dan pengendalian khusus. Berdasarkan hasil BoD, beban penyakit yang ditunjukkan dengan Tahun Hidup Yang Hilang akibat Kematian Dini dan Disabilitas karena Sakit atau DALY Lost, pada periode 1990-2017, bergeser secara signifikan dari PM (Penyakit Menular) ke PTM. Bahkan pada tahun 2017, secara nasional beban PTM mencapai proporsi 70%.

Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/154/Dinkes Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dengan melibatkan



stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Tasikmalaya yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 adalah : “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT
- b. MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA



c. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2022 sebanyak 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akses serta Layanan Kesehatan	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	42	47	52	56	60
2	Menurunnya permasalahan kesehatan di	Meningkatnya upaya kesehatan	Angka Kematian Bayi	6	5	5	4	4



	masyarakat	masyarakat dengan pendekatan keluarga						
			Angka Kematian Ibu	101	84	67	50	33
			Prevalensi Stunting	11	11	10	9	8
		Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	90	95	95
			Prosentase Puskesmas Terakreditasi	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya tata kelola administrasi dan manajemen yang profesional dan akuntabel pada dinas kesehatan	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	A	B	BB	BB	BB
			Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	1	3	3	4	4

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah



dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5).

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan kesehatan.	Realisasi jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	Perpres No. 82 Tahun 2018
2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah	Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015



					terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH)	
		Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hami, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000 kelahiran hidup (KH)	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015
		Prevalensi Stunting	%	Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan	Jumlah kasus stunting (pengukuran pada anak balita berdasarkan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014



				ketimpangan	an tinggi badan persua (TB/U) terhadap jumlah seluruh balita kali seratus	
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	SPM merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya	Cakupan implementasi penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular terhadap seluruh variable SPM penyakit menular dan tidak menular kali seratus persen	Permenkes No. 4 Tahun 2019, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri 100 Tahun 2018
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	Jumlah total nilai persepsi kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dalam kurun waktu tertentu	Permen PAN-RB Republik Indonesia No 14 Tahun 2017



					terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama kali seratus persen	
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi	Jumlah puskesmas yang telah di akreditasi dibanding jumlah seluruh puskesmas kali seratus persen	Permenkes no. 46 tahun 2015
5	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	Implementasi SAKIP wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah poin penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permen PAN-RB Republik Indonesia No 53 Tahun 2014
		Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Angka	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern	Level penilaian Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan dalam periode	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008



					tertentu	
--	--	--	--	--	----------	--

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	47
2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan	Angka Kematian Bayi	5



	pendekatan keluarga		
		Angka Kematian Ibu	84
		Prevalensi Stunting	11
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	100
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	BB
		Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3

Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2019, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu



Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kesehatan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Akses serta Layanan Kesehatan	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	42	47	52	56	60
2	Menurunnya permasalahan kesehatan di masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6	5	5	4	4
			Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	101	84	67	50	33
			Prevalensi Stunting	%	11	11	10	9	8
		Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100	100	100



		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	85	90	95	95
			Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya tata kelola administrasi dan manajemen yang profesional dan akuntabel pada dinas kesehatan	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	A	B	B	BB	BB
			Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Level	1	3	3	4	4

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan kesehatan.	Realisasi jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	Dinas Kesehatan	Perpres No. 82 Tahun 2018
2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah	Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH)	Dinas Kesehatan	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015
		Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran	Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hami,	Dinas Kesehatan	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015



Dinas Kesehatan

			hidup	program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran	bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000 kelahiran hidup (KH)		
		Prevalensi Stunting	%	Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan	Jumlah kasus stunting (pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan persuaia (TB/U) terhadap jumlah seluruh balita kali seratus	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	SPM merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya	Cakupan implementasi pananganan penyakit menular dan penyakit tidak menular terhadap seluruh variable SPM penyakit menular dantidak menular kali seratus persen	Dinas Kesehatan	Permenkes No. 4 Tahun 2019, PP nO. 2 Tahun 2018, Permendagri 100 Tahun 2018
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	Jumlah total nilai persepsi kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di seluruh	Dinas Kesehatan	Permen PAN-RBRrepublik Indonesia No 14 Tahun 2017



Dinas Kesehatan

					puskesmas dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama kali seratus persen		
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi	Jumlah puskesmas yang telah di akreditasi dibanding jumlah seluruh puskesmas kali seratus persen	Dinas Kesehatan	Permenkes no. 46 tahun 2015
5	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	Implementasi SAKIP wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah poin penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Dinas Kesehatan	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permen PAN-RB Republik Indonesia No 53 Tahun 2014
		Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Level	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern	Level penilaian Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Dinas Kesehatan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	47
2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	5
		Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	84
		Prevalensi Stunting	%	11
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	BB
		Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Level	3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan



Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah



3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 5 tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 11 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator



Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 175 tanggal 10 Januari 2018 dan melalui Keputusan Walikota Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	47	42,3	90.00
2	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	5	5,29	94.20
3	Angka Kematian Ibu	per 1000	84	93,94	88.16



		kelahiran hidup			
4	Prevalensi Stunting	%	11	10,90	99.09
5	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100.00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	78,58	92.44
7	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100.00
8	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	BB	BB	100.00
9	Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Angka	3	3	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Prosentase Puskesmas Terakreditasi, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Hasil penilaian SAKIP, dengan capaian kinerja 100 %, serta pada indikator Maturitas SPIP, dengan capaian kinerja 100 %

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan, dengan capaian kinerja 90.00 %, pada indikator Angka Kematian Bayi, dengan capaian kinerja 99,90 %, pada indikator Angka Kematian Ibu, dengan capaian kinerja 88,00 meningkat dibanding tahun 2018 dengan capaian kinerja 49.9 %, pada indikator Prevalensi Stunting, dengan capaian kinerja 96,19 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 92,44 %.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2022. Jumlah Sasaran yang



ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sebanyak 7 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dari sebanyak 7 sasaran strategis dengan sebanyak 14 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	47	42,3	90.00
2	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	5	5,29	94.20
3	Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	84	93,94	88.16
4	Prevalensi Stunting	%	11	10,90	99.09
5	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100.00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	78,58	92.44
7	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100.00
8	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	BB	BB	100.00
9	Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Angka	3	3	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019



NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampau Target	00.00 %
2	Sesuai Target	44.45 %
3	Tidak Mencapai Target	55.55 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 7 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampau target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Misi 2	6	0	0.00	2	33.33	4	66.67
3	Misi 3	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00
	Jumlah	9	0	0.00	4	44.45	5	55.55

Dari sebanyak 7 sasaran dengan sebanyak 14 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampau Target	0	0.00 %



2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %
B.	Misi 2	6	
1	Melebihi/Melampai Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	4	66.67 %
C.	Misi 3	2	
1	Melebihi/Melampai Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 7 sasaran dan sebanyak 14 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis



pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	42	40	95.24	47	42,3	90,00

Sasaran Meningkatkan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan" adalah sebesar 42,3 dari target sebesar 47 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan" tahun ini adalah sebesar 90,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 66.67 %.



Sasaran 2

Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6	6,72	88.00	5	5,295	94.20
2	Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	101	151,60	49.90	84	93,94	88.16
3	Prevalensi Stunting	%	11	10,90	99.00	11	10,90	99.09



Sasaran Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Angka Kematian Bayi" adalah sebesar 5,29 dari target sebesar 5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94.20 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Kecenderungan AKB di Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun terakhir terjadi penurunan, meskipun data menunjukkan capaian yang bersifat fluktuatif. Capaian AKB tahun 2019 sebesar 5,29 per 1.000 Kelahiran Hidup, menurun 1,42 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,72 per 1.000 Kelahiran Hidup. Kasus kematian bayi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 sejumlah 62 kasus, dan terjadi hampir di semua wilayah kecamatan di Kota Tasikmalaya. Namun, walaupun target penurunan Angka Kematian Bayi di Kota Tasikmalaya tahun 2019 belum tercapai, tetapi bila dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota sekitar masih lebih rendah. Kabupaten Ciamis 6,81 per 1.000 Kelahiran Hidup dan Kota Banjar 7,91 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia, selanjutnya faktor kelainan bawaan dan penyebab lain-lain.

Kematian bayi dengan BBLR disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik. Kematian dengan kelainan bawaan disebabkan faktor perilaku ibu hamil dan status kesehatan WUS, sedangkan kematian bayi dengan sepsis disebabkan karena perilaku ibu yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan tenaga kesehatan belum melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan infeksi.



Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka Kematian Bayi" tahun ini adalah sebesar 94.20 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 67.75 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Kematian Ibu" adalah sebesar 93,94 dari target sebesar 84 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88,16 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 93,94/100.000 Kelahiran Hidup, mengalami penurunan dibanding pada tahun 2018 sebesar 151,60/100.000 Kelahiran Hidup. Target AKI tahun 2019 adalah 84/100.000 Kelahiran Hidup.

Semua kejadian kematian ibu di Kota Tasikmalaya telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilaksanakan dalam rangka mengkaji hal-hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi ibu sejak masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Kajian audit diperoleh hasil bahwa penyebab kematian akibat Pre Eklampsia Berat (PEB) sebanyak 5 kasus (27,7%), dan emboli air ketuban sebanyak 1 kasus (0,5%). Sedangkan kematian ibu yang lainnya disebabkan oleh faktor yang berhubungan langsung dengan kehamilannya, seperti perdarahan, penyakit jantung, gagal ginjal, leukemia dan hipoglikemia. Kondisi ini yang menjadi faktor penyulit selama kehamilan persalinan, dan pemicu kegawatdaruratan persalinan, meskipun penanganan sudah optimal tetap akhirnya tidak terselamatkan.

Kematian ibu dengan eklampsia disebabkan oleh ketidaktahuan di tingkat keluarga tentang tanda bahaya pada ibu hamil, kurangnya pendampingan ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan. Kematian dengan perdarahan disebabkan oleh faktor status kesehatan ibu yaitu KEK, anemia, dan keterlambatan dalam penanganan yaitu tenaga ahli yang berkompeten, ketersediaan darah, dan peralatan yang tidak lengkap. Kematian dengan penyakit penyerta disebabkan oleh berbagai faktor yaitu



perilaku masyarakat yang status kesehatannya tidak memungkinkan untuk hamil tapi tetap hamil, dan kesadaran untuk konsultasi pra konsepsi.

Solusi pada tahun berikutnya melalui kegiatan pendampingan yang terfokus pada ibu hamil dengan penyakit penyerta maupun penyulit kehamilan. Intensifikasi kelas ibu di Puskesmas untuk menjamin kontinuitas edukasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis obsgin di Puskesmas, mengembangkan edukasi perawatan kehamilan melalui media sosial yang memudahkan untuk diakses oleh ibu hamil secara kontinyu melalui *hotline service* di masing-masing puskesmas. Ibu akan memperoleh informasi dan tips kesehatan bagi ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka Kematian Ibu" tahun ini adalah sebesar 88,16 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kerjanya mencapai 54.55 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Prevalensi Stunting" adalah sebesar 10,90 dari target sebesar 11 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99.09 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prevalensi Stunting" tahun ini adalah sebesar 99.09 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kerjanya mencapai 80.00 %.



Sasaran 3

Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Cakupan SPM pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular diatas menunjukkan rata-rata cakupan pelayanan mengalami kenaikan yang berarti secara kuantitas program telah dilaksanakan dengan baik, dan diharapkan secara umum berdampak pada penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular di masyarakat.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Sasaran 4

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,58	98.00	85	78,58	92.44
2	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 78,58 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92.44 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 98.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kerjanya mencapai 82.11 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase Puskesmas Terakreditasi" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Cakupan prosentase puskesmas terakreditasi diatas menunjukkan bahwa proses peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selalu dilakukan secara kontinyu. Salah satunya dengan standarisasi pelayanan



yang melibatkan audit dari Komisi Akreditasi Nasional. Tahun 2019 seluruh puskesmas di Kota Tasikmalaya sudah terakreditasi.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase Puskesmas Terakreditasi" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.



Sasaran 5

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	B	B	100.00	BB	BB	100.00
2	Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Angka	1	3	300.00	3	3	100.00

Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan" adalah kategori BB dari target BB yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP Dinas Kesehatan" adalah sebesar 3 dari target sebesar 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP Dinas Kesehatan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila



dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 128.57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 141.53 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98.89 %
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 129.03 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 70.121.066.685,90 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 66.641.401.216,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.479.665.469,90.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 128.57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 141.53 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98.89 %
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 129.03 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 70.121.066.685,90 (tujuh puluh milyar seratus dua puluh satu enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah 95,04 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah cukup baik tetapi



masih perlu perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, Februari 2020

UUS SUPANGAT, dr.

NIP. 19700903 200604 1 008